

SEJARAH DESA PENEROKAN KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANGHARI TAHUN 1935-2018

Waryanti¹, Samsul Huda², Hendra Gunawan³

wryanti21@gmail.com

Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Sejarah munculnya desa memiliki peranan penting pada pertumbuhan desa di masa mendarang. Penelitian ini membahas tentang Sejarah Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari pada tahun 1935-2018. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana Sejarah Munculnya Desa Penerokan pada tahun 1935-2018. Kedua, untuk memahami Sejarah Kepemimpinan Kepala Desa Penerokan. Ketiga, untuk melihat perkembangan kehidupan sosial masyarakat di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, metode ini memiliki empat tahap penelitian yaitu Heuristik (Pengumpulan Data), Verifikasi (Kritik Sumber), Interpretasi (Analisis Fakta Sejarah), dan Historiografi (Penulisan Sejarah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sejarah Desa Penerokan berdimulai pada tahun 1935. Menurut legenda masyarakat setempat dinamakan Dusun Terok karena wilayah tersebut memiliki sebuah sungai yang cukup besar dan terdapat ikan yang banyak. Dusun Terok menjadi lokasi kedatangan bangsa kolonial Belanda bertujuan melakukan ekspedisi pengelolaan minyak di wilayah Kelurahan Bajubang. Kemudian mereka menjadikan wilayah Dusun Terok sebagai daerah singgahan atau transit untuk meletakkan barang-barang keperluan sehari-hari, selama melakukan aktivitas di Wilayah Bajubang. Hal ini yang menjadikan masyarakat setempat menyebut wilayah Dusun Terok sebagai Kampung Penarukan. Kemudian seiring berjalannya waktu, dengan adanya UU No. 05 Tahun 1979 yang mengatur tentang desa. Kampung Penarukan berubah menjadi Desa Penerokan pada masa kepemimpinan bapak Iyan Susanto

Kata Kunci: Desa Penerokan, Kepemimpinan, Pembangunan Desa.

Pendahuluan

Masyarakat yang dinamis identik dengan kehidupan masyarakat pedesaan, sebab desa merupakan suatu komunitas yang dipandang unik. Keunikan ini dalam pandangan umum terlihat dari kesejukan, kedamaian, dan jaminan kebahagiaan masyarakat. Desa berasal dari bahasa India yakni Swadesi. Dalam pengertian yang sama, desa didefinisikan sebagai suatu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan sosial yang hidup dan tinggal menetap di suatu daerah tertentu, dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formil yaitu kepala desa. Selain itu, desa merupakan satuan terkecil dari pemerintahan negara sejak zaman kerajaan hingga penjajahan dan kemerdekaan. Sebagai satuan terkecil, desa merupakan kesatuan wilayah yang mandiri dalam bentuk dan jenis model kepemimpinan di Indonesia (Pahmi Sy, 2010:20-21).

Menurut UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat dipahami bahwa desa merupakan kesatuan tempat tinggal bersama dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan lainnya terjalin dengan erat yang mengatur rumah tangganya sendiri. Masyarakat desa sendiri memiliki corak kehidupan yang berbeda dari masyarakat kota. Masyarakat desa sebagai kesatuan teritorial dan administratif yang terkecil di Indonesia. Selanjutnya desa mempunyai garapan masyarakat peani dan ekonomi agraris. Hal tersebut menjadi bagian dari masyarakat desa untuk melihat perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu yang diungkapkan dengan proses yang bertahap (Kuntowijoyo, 2003:73-75).

Pada masa kolonial, pemerintahan Belanda di Indonesia secara umum menjadi catatan sejarah tersendiri atas kemerdekaan bangsa. Pada saat itu, Jambi termasuk daerah jajahan Belanda. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aktivitas kehidupan sosial yang terjadi di Bajubang. Selain itu, akses yang dilewati Belanda untuk sampai di Bajubang melewati salah satu wilayah yang saat ini dikenal dengan Desa Penerokan (Locher-Scholten, 2008:327). Desa Penerokan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Desa Penerokan sudah ada sejak zaman kolonial dengan nama Dusun Terok.

Desa Penerokan berdiri pada tahun 1935. Berdasarkan sumber yang pertama pada tahun 1939, menurut legenda masyarakat setempat dinamakan Dusun Terok karena wilayah tersebut memiliki sebuah sungai yang cukup besar dan terdapat ikan yang banyak. Kemudian masyarakat membuat alat dari bambu untuk mengambil ikan di sungai, dan alat tersebut dikenal dengan "Terok". Hal itu yang melatarbelakangi masyarakat lebih mengenal wilayah tersebut dengan nama Dusun Terok. Sedangkan berdasarkan sumber yang kedua pada tahun 1944, Dusun Terok menjadi catatan sejarah atas kedatangan bangsa kolonial yaitu orang-orang Belanda di Provinsi Jambi pada umumnya. Pada saat itu, orang-orang Belanda melakukan ekspedisi pengelolaan minyak di wilayah Kelurahan Bajubang. Kemudian mereka menjadikan wilayah Dusun Terok sebagai daerah singgahan atau transit untuk meletakkan barang-barang keperluan sehari-hari, selama melakukan aktivitas di Wilayah Bajubang. Hal ini yang menjadikan masyarakat setempat menyebut wilayah Dusun Terok sebagai Kampung Penarukan. Kemudian seiring berjalannya waktu, dengan adanya UU No. 05 Tahun 1979 yang mengatur tentang desa. Kampung Penarukan berubah menjadi Desa Penerokan pada masa kepemimpinan bapak Iyan Susanto (Sidik, 2019).

Sebelum diberlakukannya UU No. 05 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, daerah-daerah yang di huni oleh orang-orang Melayu di Jambi telah mengenal dan menjalankan sistem pemerintahan yang dikenal dengan Marga, Mendapo dan Kampung Marga terdapat dalam Kabupaten Sarolangun, Bangko Bungo, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat dan Timur. Sedangkan Mendapo terdapat dalam Kabupaten Kerinci. Kemudian

untuk Kampung terdapat di Kota Jambi (Pahmi Sy, 2010:55). Pada orde baru, sistem pemerintahan mengalami perubahan yang menyebutkan bahwa, desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suhartono, dkk, 2000:12).

Pada awal berdirinya, Desa Penerokan dipimpin oleh pemimpin yang memiliki tipe-tipe kepemimpinan yang bermacam-macam, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan Desa Penerokan. Pada awal kepemimpinan, kepala desa di Desa Penerokan diberi gelar kepala kampung. Gelar tersebut berlangsung sejak tahun 1935-1979 dan sejarah mencatat selama 44 tahun, yaitu pada masa kepemimpinan Bapak Iyan Susanto. Desa Penerokan telah melaksanakan sembilan kali pergantian kepala desa dan tujuh kali pergantian PLT kepala desa. Dalam hal ini, sejarah kepemimpinan juga mempengaruhi sejarah Desa Penerokan dalam beberapa aspek kehidupan sosial, agama dan budaya masyarakat Desa Penerokan.

Sejarah Desa Penerokan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sejarah kepemimpinan, hal ini dapat dilihat dari setiap pergantian kepemimpinan yang terjadi di desa tersebut melalui kebijakan-kebijakannya. Bermula dari perubahan sistem kepala kampung menjadi kepala desa yang tercetus pada undang-undang UU No. 05 tahun 1979. Perkembangan masyarakat desa juga tidak terlepas dengan aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya, diluar ruang lingkup masyarakat tersebut. Hal-hal itu telah banyak membawa berbagai perubahan pada masyarakat desa, karena melalui jaringan yang dilakukan secara terus-menerus akan menghadirkan nilai-nilai baru yang berkembang di wilayah itu (Pahmi Sy, 2010:105).

Pembangunan pedesaan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Karena pembangunan di pedesaan bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, maka usaha ini harus dirancang secara jelas dan tegas karena peningkatan produksi dan produktivitas. Masyarakat yang mandiri dapat tercipta dari pembangunan desa. Bukan saja untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, namun juga untuk kepentingan nasional secara umum, yang berarti bahwa pembangunan pedesaan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan nasional.

Dengan keadaan seperti itu, maka keberadaan desa baik secara lembaga pemerintahan maupun sebagai identitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai identitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan masyarakat Indonesia yang sangat kokoh, sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya dan bahkan yang stabil dan dinamis.

Metode Penelitian

Metode Sejarah

Peneliti untuk menyelesaikan permasalahan penelitian tersebut dengan menggunakan metode sejarah. Langkah-langkah metode sejarah sebagai berikut:

1) Heuristik (Pengumpulan Data)

Heuristik, yaitu berasal dari kata Yunani heuriskein, maknanya memperoleh. Heuristik Menurut G.J. Reiner yang dikutip Dudung dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sejarah Islam merupakan teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Heuristik sering kali merupakan suatu ketrampilan dalam menemukan, menangani dan memperinci bibliografi, atau mengklarifikasi dan merawat catatan-catatan (Abdurahman, 2011:104).

2) Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik Sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber, a) kritik eksternal merupakan usaha mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. b) kritik internal merupakan kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber.

3) Interpretasi (Analisis Fakta Sejarah)

Interpretasi atau penafsiran. sejarah disebut juga analisis sejarah. Analisis sendiri yang menguraikan, dan secara terminologi berbedadengan sintesis yang menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama didalam interpretasi. Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurahman, 2011:114). Interpretasi merupakan proses menafsirkan fakta-fakta sejarah serta proses penyusunannya menjadi suatu kisah sejarah yang integral menyangkut proses seleksi sejarah.

4) Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberi gambaran mengenai proses penelitian dari awal (perencanaan) sampai akhir (kesimpulan) (Abdurahman, 2011:30).

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Desa Penerokan

Berbeda dengan asal nama Jambi yang terdiri dari berbagai pendapat, asal nama penerokan hanya dua pendapat. Pada awalnya daerah Terok merupakan daerah yang memiliki sungai besar dan berbagai jenis ikan hidup di sungai. Sehingga masyarakat banyak mencari ikan di sungai tersebut menggunakan alat yang di kenal dengan Terok. Menurut tradisi Jisan, terok berasal dari nama alat penangkap ikan yang terbuat dari bambu. Maka atas dasar tersebut

daerah tersebut dibentuk menjadi sebuah dusun terok (Sukirman, __:13). Pada tahun 1939, nama Pencrokan mulanya berasal dari kata Terok. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak H. Sukirman selaku Kepala Desa Penerokan Periode 1990-1995, beliau menjelaskan bahwa Desa Penerokan itu, asal mulanya berasal dari dua kata. Kata pertama bernama Terok. Terok merupakan sejenis alat yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai, sebab dahulu Desa Penerokan terdapat sungai yang cukup besar. Nah, alat tersebut digunakan masyarakat untuk mencari ikan di sungai tersebut (Sukirman, 2020).

Sumber lain mengatakan pada tahun 1944, keberadaan Dusun Terok pada masa penjajahan Belanda tepatnya pada masa pemeritahan Wiryo Pawiro sebagai kepala kampung daerah tersebut berubah menjadi Kampung Penarukan. Menurut tradisi lisan masyarakat Desa Penerokan, bahwa pada masa penjajahan Belanda wilayah Desa Penerokan dimanaatkan untuk menjadi base-camp atau tempat singgah orang-orang Belanda, yang hendak melakukan pengeboran minyak rakyat di wilayah Bajubang sekaligus meletakkan barang-barang keseharian mereka (Tasno, 2020).

Pada masa kolonial, pemerintahan Belanda di Indonesia secara umum menjadi catatan sejarah tersendiri atas kemerdekaan bangsa. Pada saat itu, Jambi termasuk daerah jajahan Belanda. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aktivitas kehidupan sosial yang terjadi di Bajubang. Selain itu, akses yang dilewati Belanda untuk sampai didaerah Bajubang melewati salah satu wilayah yang saat ini dikenal dengan Desa Penerokan (Locher-Scholten 2008:327). Penjajah Belanda cukup mempengaruhi asal mula nama Desa Pencrokan, sekaligus menjadi catatan sejarah bahwa orang-orang Belanda pernah singgah dan menitipkan alat-alat dan barang keperluannya di wilayah Desa Penerokan, yang pada saat itu sedang melakukan pengeboran minyak di daerah Bajubang pada tahun 1944.

Pada masa itu di pimpin oleh Bapak Joyo Karso, dan berlanjut kepemimpinan oleh Bapak Wiryo Pawiro dengan nama Kepala Kampung Pencrokan Marga Pelayung Ulu (Tasno, 2020). Sejak awal berdirinya wilayah yang kita kenal Desa Penerokan saat ini. Wilayah ini masih menerapkan sistem kepala kampung untuk pimpinan tersebut. Bermula dari masa bapak Joyo Karso Hingga Pertengahan Periode Bapak Iyan Susanto. Karena pada tahun 1979 keluar peraturan pemerintah terbaru tentang Desa yaitu, UU No. 05 tahun 1979.

Perubahan dari status Kampung Penarukan menjadi Desa Penerokan seiring berjalannya waktu bertambahnya jumlah penduduk dan banyaknya masyarakat yang mulai berdatangan, pengawasan terhadap beberapa wilayah Kecamatan Bajubang. Kampung Penarukan dibentuk menjadi Desa Penerokan berawal dari sebuah usulan yang dilakukan oleh masyarakat. Pada saat itu dipimpin oleh Iyan Susanto pada pertengahan tahun 1976 dan usulan tersebut diterima sehingga pada tahun 1977 Kampung Penarukan dibentuk menjadi Desa Pencrokan (Sukirman, 2020).

Hal ini terjadi disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Desa yang mengacu pada undang-undang Nomor 5 tahun 1979, sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 (1) desa dibentuk dengan

memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat lain yang ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, (2) pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Sugiono, 2020).

Desa Penerokan merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bergerak dibidang pertanian dan perkebunan. Dilihat dari segi geografis Desa Penerokan masih memiliki wilayah yang luas, yang bisa dijadikan untuk lokasi pertanian dan perkebunan. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Penerokan merupakan dasar dalam pembangunan baik itu potensi ekonomi pertanian, perkebunan, maupun berbagai macam jenis usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian menjadikan pembangunan di daerah ini semakin maju dimana tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat banyak di pengaruhi tinggi rendahnya kehidupan ekonomi masyarakat Desa Penerokan (Dadaswati dan Benawi, 2016:93). Dari banyaknya jumlah penduduk dan luasnya wilayah di Kecamatan Bajubang, terutama Desa Penerokan yang terbagi menjadi menjadi empat dusun yaitu Dusun Purwosari, Dusun Purwodadi, Dusun Wonorejo, dan Dusun Sekarsari dengan Kepala Desa Sugiyono.

Perubahan status Kampung Penarukan menjadi Desa Penerokan banyak memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pembangunan berjalan dengan baik dan meluas. Selain itu, pembangunan dilakukan secara merata dan dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat Desa Penerokan mencakup segala aspek.

Perkembangan Kepemimpinan

Sejarah kepemimpinan, suatu wilayah memiliki pengaruh yang sangat signifikan, terhadap perkembangan wilayah tersebut. Salah satunya Desa Penerokan. Seiring dengan terbentuknya Desa Penerokan beberapa masyarakat yang memiliki pendidikan serta bisa membaca dan menulis ditempatkan sebagai staf desa serta menjadi kepala lingkungan ditunjukkan untuk membantu jalannya pemerintahan di Desa Penerokan. Pada saat itu, meski struktur desa belum tertata kegiatan pelayanan di Desa Penerokan berjalan dengan cukup baik.

Berdasarkan hal tersebut, perubahan status Kampung Penarukan menjadi Desa Penerokan merupakan proses yang telah teratur dalam sistem pemerintahan pada masa itu dan secara keseluruhan mengikuti ketentuan undang-undang dan Menteri Dalam Negeri didalam pelaksanaannya (Sukirman, 2020).

Hingga sampai saat ini Desa Penerokan masih dalam wilayah Kecamatan Bajubang, namun dengan dimekarnya Kabupaten Indragiri maka wilayah Desa Penerokan masuk dalam naungan pemerintahan Kabupaten Batanghari. Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan Desa Penerokan yaitu,

- 1) Masa Kepemimpinan Joyo Karso (1935)
- 2) Masa Kepemimpinan Wiryo Pawiro (1935-1955)
- 3) Masa Kepemimpinan Sarto (1956-1968)

- 4) Masa Kepemimpinan Iyan Susanto (1969-1990)
- 5) Masa Kepemimpinan Sukirman (1990-1995)
- 6) Masa Kepemimpinan Sugiyono (1998-2003)
- 7) Masa Kepemimpinan Jon Kenedy (2004-2008)
- 8) Masa Kepemimpinan Eka Sutyanto (2009-2015)
- 9) Masa Kepemimpinan Sugiyono (2016-2022)

Perkembangan Sosial

Perkembangan sosial yang sangat terasa adalah perubahan interaksi sosial (Sosial Interaction). Hubungan sosial hubungan sosial kemasyarakatan antara warga Desa Penerokan dengan pendatang berjalan cukup harmonis, bahkan boleh dikatakan pendatang sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Prinsip masyarakat setempat mencari teman atau menambah saudara tanpa pandang bulu (Wijaya, 2020).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada mulanya hubungan antara masyarakat Desa Penerokan dengan pendatang menunjukkan keterikatan sosial yang lebih tanpa memandang perbedaan status sosial dan perbedaan suku. Terbukti dengan adanya masyarakat pendatang yang menikah dengan masyarakat Desa Penerokan. Bahkan kebanyakan masyarakat pendatang yang menikah dengan masyarakat Desa Penerokan sudah menetap dan menjadi warga Desa Penerokan, hal ini juga didukung dengan pergaulan yang cepat beradaptasi dengan masyarakat Desa Penerokan. Karena pergaulan yang begitu baik, serta semangat kerja yang luar biasa, maka pendatang ini dikenal dan selalu menjadi sahabat yang baik oleh masyarakat pribumi (Sidik, 2020).

Perkembangan yang diperlihatkan oleh masyarakat pendatang nampak pula dengan adanya adaptasi dengan penduduk Desa Penerokan dengan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial misalnya: kerja bakti yang sudah menjadi rutinitas di Desa Penerokan, gotong royong membuat jalan-jalan usaha tani dan bila ada yang mendirikan rumah tempat tinggal bahkan dalam proses pengolahan lahan untuk pertanian serta dalam program penanaman Tanaman Toga pada setiap dusun di Desa Penerokan (Novita dan Baerawi, 2016:67).

Penduduk yang mendiami Desa Penerokan yakni masyarakat mayoritas berasal dari suku Jawa. Solidaritas diantara warga masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas sehari-hari dilakukan dengan cara gotong-royong, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya sejak zaman dahulu. Dalam hal membangun Desa Penerokan Seperti pembangunan jalan-jalan setapak usaha tani, pembangunan rumah sesama warga, pembangunan gedung kesehatan, pembangunan gedung sekolah, pembangunan, gedung balai desa, pembangunan tempat-tempat ibadah, pembuatan tanaman toga dan lain sebagainya biasanya dilaksanakan secara gotong-royong (Wijaya, 2020). Demokrasi Pemerintahan Desa, dengan dilaksanakannya Pemilihan

Kepala Desa secara serentak dengan sistem E-voting, dengan terpilihnya kembal Sugiyono. Pemilihan kepada desa secara E-Voting ini pertama kalinya se-Indonesia dilakukan di Desa Penerokan. Beliau dipercaya kembali untuk mengemban amanah masyarakat. Hal ini yang mendukung perkembangan desa dalam aspek sosial. Karena pada pemilihan sebelumnya pemungutan suara dilaksanakan secara manual menggunakan kertas suara.

Hubungan sosial antar masyarakat pun berjalan dengan harmonis seiring berdampingan meskipun memiliki perbedaan suku, ras, agama, dan profesi. Pernyataan ini menunjukkan suatu karakteristik sosial yang lebih baik tanpa memandang perbedaan status sosial masyarakat. Kemudian pada tahun 1991 jumlah penduduk Desa Penerokan hanya berkisar 4.304 jiwa, sedangkan berdasarkan data pada tahun 2018 jumlah penduduk Desa Penerokan sudah mencapai 8.318 Jiwa dengan luas wilayah Desa Penerokan 12.000 KM².

Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, masyarakat Desa Penerokan tetap hidup rukun dan saling berdampingan dengan baik. Hal tersebut terwujud dalam berbagai macam kegiatan masyarakat yang diselenggarakan tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Pada sektor dan bidang partisipasi masyarakat di Desa Penerokan ini sudah sangat baik karena salah satu ciri khas Desa Penerokan adalah menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan swadaya masyarakat (Mardi, 2020).

Hal ini sangat tampak pada setiap kegiatan, baik kegiatan keagamaan seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHEI) di setiap Masjid dan beberapa mushola dalam Desa Penerokan, kegiatan Pengajian, kegiatan Peringatan Hari besar Nasional, MTQ, dan lain sebagainya. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat di lihat dari respon masyarakat terhadap agenda agenda nasional maupun daerah bahkan di Desa itu sendiri, seperti Pemilu, Pemilukada, Pilkades, hingga pemilihan ketua RT dan pengurus organisasi kemasyarakatan lainnya dengan capaian partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pemilu presiden/wakil presiden dan pemilu legislatif mencapai 85%.

Pada bidang lembaga kemasyarakatan, Desa Penerokan pun memiliki beberapa Lembaga kemasyarakatan Desa di antaranya Lembaga Adat Desa, Karang Taruna, Pusat Kesejahteraan Keluarga (PKK), lembaga kemasyarakatan lainnya seperti LPTQ, Kader Tribina, dan lembaga paguyuban suku yang ada di Desa Penerokan seperti Paguyuban CPP (Cah Purworejo Perantauan), HKKP (Himpunan Keluarga Kerinci Penerokan). Dengan melihat pada perkembangan kehidupan bermasyarakat di Desa. Kemudian penambaitan lembaga kemasyarakatan Desa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

Selain itu, guna untuk mengupayakan optimalisasi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan keagamaan, karakter serta kerukunan umat beragama juga mendirikan sebuah lembaga pendidikan non-formal seperti: Kelompok Pengajian Antara Maghrib dan Isya (PAMI), Kelompok pengajian rutin mingguan, Kelompok pengajian rutin bulanan, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), dan Majelis Taklim (Sidik, 2020).

Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang belangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat desa serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan potensi SDA melalui prakarsa, keterampilan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sehingga terjadi pengembangan wilayah bagi wilayah pedesaan. Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar wilayah itu berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Pengembangan wilayah pada masyarakat desa dilaksanakan melalui optimasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara harmonis, serasi dan terpadu melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, untuk melakukan pembangunan desa dan pengembangan wilayah di Desa Penerokan harus mementingkan aspek sosial yaitu kehidupan masyarakat desa yang meliputi tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan serta sistem kekerabatan yang dapat menunjang dalam pengembangan wilayah di Desa Penerokan sehingga pembangunan desa kedepannya mengalami kemajuan demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Penerokan.

Dengan adanya pengembangan wilayah di Desa Penerokan akan memiliki ruang lingkup antara lain : 1) Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan dan lingkungan pemukiman), 2) Pemberdayaan masyarakat, 3) Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan kemampuan SDM, 4) Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin, 5) Peningkatan keterkaitan antar daerah pedesaan dengan daerah perkotaan.

Perkembangan Ekonomi

Nilai produksi Kabupaten Batanghari secara keseluruhan adalah sebesar 20,9% (1988) dari produksi keseluruhan Provinsi Jambi. Kabupaten Batanghari memberikan sumbangan bagi perekonomian Provinsi Jambi berupa penghasilan dari minyak, disamping kayu dan karet. Sumbangan sektor pertambangan dan galian terutama minyak mentah Kabupaten Batanghari terhadap Provinsi Jambi mencapai 96,5% (1983) dan menjadi 97,9% (1987). Bagi PDRB Kabupaten Batanghari, sumbangan sektor pertambangan dan galian mencapai 50,47% (1983) dan menurun menjadi 41,42% pada tahun 1987. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten batanghari merupakan sumber devisa bagi perekonomian Daerah Jambi, dan struktur ekonomi Kabupaten Batanghari adalah ekonomi minyak (Mubyarto, dkk, 1990:13).

Sebagaimana uraian di atas, pembangunan pedesaan yang membangkitkan swadaya masyarakat menunjukkan kemandiriannya meskipun laju pertumbuhan ekonomi mengalami kelesuan. Swadaya masyarakat pedesaan ini ditunjang pula oleh diversifikasi sumber penghasilan penduduk, sehingga kelesuan suatu usaha dapat ditutup oleh usaha lainnya

Penduduk yang mendiami Desa Penerokan merupakan penduduk yang mayoritas dari Suku Jawa. Meskipun demikian, masyarakat di wilayah tersebut selalu hidup berdampingan. Kehidupan masyarakat Desa Penerokan bertantung pada hasil pertanian. Adapun yang menjadi potensi terbesar adalah perkebunan karet dan sawit yang tersebar di Desa

Penerokan. Disamping itu masyarakat juga menanam berbagai macam jenis tanaman seperti, ubi, pepaya, pisang, jagung, kacang-kacangan serta sayur-sayuran. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Sekian banyak profesi yang ada di Desa Penerokan, Ahmad Sidik menuturkan berkebun sebagai penghasil makanan sehari-hari, dan menyadap karet adalah pekerjaan yang paling banyak digeluti masyarakat Desa Penerokan.

Seiring perkembangan desa maka dibangunlah sebuah pasar yang didirikan pada zaman kepala desa ketiga yaitu Sarto sekitar tahun 1969, dan kemudian dilakukan pemindahan lokasi pasar tradisional tersebut pada masa kepala desa Jon Kenedi pada tahun 2007. Dengan adanya pasar tradisional tersebut maka kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dapat dilakukan di pasar tradisional Desa Penerokan (Sugiono, 2020).

Selain pasar tradisional Desa Penerokan, terdapat juga warung, toko, mini market, kegiatan usaha mikro kecil menengah seperti pembuatan dodol, kain tenun, usaha pembuatan makanan ringan, jasa penjahit pakaian, jasa pangkas rambut, bengkel, dan lain sebagainya yang merupakan usaha di bidang perekonomian.

Kebijakan pembangunan ekonomi yang memacu pada pertumbuhan telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten secara umum dan Desa Penerokan secara khusus. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang di capai tersebut didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sektor pertanian yang dicapai merupakan usaha di verifikasi yang dilakukan oleh penduduk pedesaan sebagai akibat dari kelesuan harga komoditi karet dan kelancaran transportasi darat. Dengan lancarnya transportasi darat tersebut, hasil produksi pertanian mempunyai nilai ekonomi dan dapat dijual langsung ke pasar. Selain itu, desa tersebut menjadi terbuka dari isolasi fisik, sosial dan ekonomi (Sukirman, 2020).

Perkembangan Agama dan Budaya

Sebagian besar penduduk Desa Penerokan adalah penduduk pendatang yang termasuk Suku Jawa, dan pemeluk Agama Islam yang taat. Hampir di setiap desa tersedia sarana ibadah berupa masjid. Pola kehidupan bermasyarakat berdasarkan pada hukum Islam. Hal ini terlihat pada aturan-aturan adat, antara lain hukum pembagian warisan, pergaulan muda-mudi, dan perkawinan atau kematian. Bagi penduduk asli Jambi, agama dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kekuatan adat dan kataatan agama merupakan bentuk tata cara yang menjadi pedoman kehidupannya. Hal tersebut dipegang kuat dan merupakan benteng untuk menghindarkan masuknya budaya modern yang merusak citra kehidupan mereka.

Dalam hal ini terjadi proses akulturasi budaya mengenai proses perpaduan antara unsur budaya Adat Jambi dengan unsur kehidupan masyarakat Suku Jawa. Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk Desa Penerokan ialah Suku Jawa tetapi minoritas Penduduk melayu tetap berusaha menjaga hukum dan tata adat budaya Jambi. Sehingga masyarakat Desa Penerokan tidak menghilangkan satu pun unsur budaya yang tersebar di Desa Penerokan melainkan memadukan unsur budaya tersebut sehingga tampak serasi tanpa menghilang citra kedua unsur kebudayaan tersebut.

Bahwa adat budaya daerah, khususnya adat budaya masyarakat Desa Penerokan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya bangsa, sampai saat ini semakin menyusut dan hilang keberadaannya dari kehidupan keseharian masyarakat Desa Penerokan. Pada adat budaya Desa Penerokan itu berdiri pada pondasi yang kokoh dan kuat serta berlandaskan kepada Agama khususnya Agama Islam (Anonim, 2001:1).

Sebagaimana yang di jelaskan oleh mbah H. Tasno selaku Tokoh Agama Desa Penerokan, beliau menjelaskan bahwa:

“Prinsip dasar adat dan budaya Jambi adalah sebagaimana tertuang dalam Seloko Adat yang berbunyi "Adat Bersendi Syara' dan Syara' Bersendi Kitabullah." dari kata-kata Syara' dan Kitabullah itulah maka semua adat istiadat dan budaya Jambi senantiasa berlandaskan kepada 'aqidah dan syariah'”.

Dengan demikian, dalam rangka melestarikan dan memberdayakan kembali adat budaya yang semakin ditinggalkan dalam kehidupan keseharian masyarakat Jambi. maka Tokoh Pengurus Adat Desa Penerokan melakukan upaya pembinaan dan pelestarian Adat Jambi di Desa Penerokan. Budaya daerah Jambi terbentuk oleh nilai-nilai luhur yang di junjung tinggi oleh masyarakat Desa Penerokan itu sendiri, serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam pergaulan bermasyarakat (Anonim, 2001:10).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Sejarah Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten tahun 1935-2018. Maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan sebagai berikut *Pertama*, Sejarah Desa Pencrokan berdiri pada tahun 1935. Berdasarkan sumber yang pertama pada tahun 1939, menurut legenda masyarakat setempat dinamakan Dusun Terok karena wilayah tersebut memiliki sebuah sungai yang cukup besar dan terdapat ikan yang banyak. Kemudian masyarakat membuat alat dari bambu untuk mengambil ikan di sungai, dan alat tersebut dikenal dengan “Terok”. Hal itu yang melatarbelakangi masyarakat lebih mengenal wilayah tersebut dengan nama Dusun Terok. Sedangkan berdasarkan sumber yang kedua pada tahun 1944, Dusun Terok menjadi catatan sejarah atas kedatangan bangsa kolonial yaitu orang-orang Belanda di Provinsi Jambi pada umumnya. Pada saat itu, orang-orang Belanda melakukan ekspedisi pengelolaan minyak di wilayah Kelurahan Bajubang. Kemudian mereka menjadikan wilayah Dusun Terok sebagai daerah singgahan atau transit untuk meletakkan barang-barang keperluan sehari-hari, selama melakukan aktivitas di Wilayah Bajubang. Hal ini yang menjadikan masyarakat setempat menyebut wilayah Dusun Terok sebagai Kampung Penarukan. Kemudian seiring berjalannya waktu, dengan adanya UU No. 05 Tahun 1979 yang mengatur tentang desa, Kampung Penarukan berubah menjadi Desa Penerokan pada masa kepemimpinan bapak Iyan Susanto.

Kedua, Sejarah kepemimpinan Desa Penerokan Kecamatan Bajubang memiliki pengaruh yang sangat signifikan, terhadap perkembangan wilayah Desa Penerokan. Seiring dengan terbentuknya Desa Penerokan beberapa masyarakat yang memiliki pendidikan serta

bisa membaca dan menulis ditempatkan sebagai staf desa serta menjadi kepala lingkungan ditunjukkan untuk membantu jalannya pemerintahan di Desa Penerokan. Pada kepemimpinan Joyo Karso tahun 1935, meski struktur desa belum tertata kegiatan pelayanan di Desa Penerokan berjalan dengan cukup baik. Sistem pemerintahan belum terbentuk secara undang-undang dan masyarakat masih menggunakan hukum adat setempat. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Wiryo Pawiro tahun 1935-1955, beliau melanjutkan kegiatan dan program yang dilakukan kepala kampung sebelumnya. Pertahanan wilayah sangat diupayakan oleh beliau sebagai kepala kampung karena Desa Penerokan memiliki wilayah yang cukup luas. Kemudian pada masa kepemimpinan Sarto tahun 1956-1968, beliau membagi wilayah menjadi tiga RT (Rukun Tetangga) dan mengadakan pembangunan pasar tradisional Desa Penerokan pada tahun 1965. Dengan adanya pembangunan pasar tradisional tersebut, perekonomian masyarakat Desa Penerokan mengalami peningkatan. Setelah itu, pada masa kepemimpinan Iyan Susanto tahun 1969-1990, Beliau memiliki sistem kerja dari rumah, tidak terfokus hanya kepada kantor desa. Pada masa beliau mengalami transisi sistem kepemimpinan mengenai Undang-undang No. 05 tahun 1979 tentang desa. Pada mulanya beliau menjabat sebagai kepala kampung penerokan, kemudian berubahlah menjadi kepala Desa Penerokan. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Sukirman tahun 1990-1995, pemilihan umum kepala desa pertama kali terjadi pada tahun 1989. Ketegasan yang beliau terapkan selama menjabat memberikan manfaat dimasa jabatannya, yang hanya berjalan lima tahun untuk melanjutkan pembangunan desa. Mengenai tata laksana dan administrasi pengelolaan dokumen, arsip dan aset desa dikelola dengan baik, dan menstabilkan perekonomian rakyat dengan dibangunnya usaha yang tinggi dan mengoptimalkan pelayanan perangkat desa terhadap masyarakat.

Ketiga, Perkembangan kehidupan masyarakat Desa Penerokan dapat dilihat dari solidaritas diantara warga masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas sehari-hari, dilakukan dengan cara gotong royong yang sudah merupakan kebiasaan masyarakat sejak dahulu, dalam hal membangun Desa Penerokan seperti membuat jalan-jalan usaha tani, pembangunan rumah sesama warga, serta dalam proses pengelolaan lahan pertanian dan kegiatan-kegiatan lain yang biasanya dilakukan secara gotong royong. seiring perkembangan Desa Penerokan Kecamatan Bajubang pembangunan terjadi di beberapa bidang baik itu pembangunan fasilitas umum maupun sarana dan prasarana yang menjadi kegiatan pemerintah: yang menunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Penerokan.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2001. Pokok-Pokok Adat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Seni dan Adat Budaya Jambi. Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi.
- Abdurahman, Dudung. 2011. Metode Penelitian Sejarah Isian. Yogyakarta: Ombak.
- Dadaswati, Ali Hadara dan La Ode Benawi. 2016. "Sejarah Kampung Dandila Menjadi Desa Marobe Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat (1960-2015)". Historical Education, Vol.1, No.1
- Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah: Edisi Kedua. Yogyakarta: PT.Tiam Wacana Yogya.

- Locher-Scholten, Elsbeth. 2008. Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda. Jakarta: Banana.
- Mubyarto, dkk. 1990. Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta.
- Mardi. 2019. Wawancara
- Novita dan La Ode Baerawi. 2016. Perkembangan Masyarakat Desa Terapung di Kecamatan Mawangsa Kabupaten Buton Tengah (1970-2015) Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah, Vol 1 No. 2
- Pahmi Sy. 2010. Prespektif Baru Antropologi Pedesaan. Jakarta: GP Press.
- Purnamasari, Diah & Surya Ely S. 2017. Peraturan Lengkap Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014). Jakarta: Sinar Grafik.
- Sidik, Ahmad. 2019. Wawancara
- Sidik, Ahmad. 2020. Wawancara
- Suhartono, dkk. 2000. Purlen Desa Dinamika Kelurahan dan DPRK Gotong Royong. Jakarta: Lapera.
- Sugiono. 2020. Wawancara.
- Sukirman. _____. Selayang Pandang Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kab.Dati II Batanghari.
- Sukirman. 2020. Wawancara.
- Tasno, H. 2019. Wawancara.
- Wijaya, Kiki. 2019. Wawancara.